

Buletin STPMD "APMD" Yogyakarta

JENDELA

Keterbukaan, Kebersamaan, Kemitraan

Modal Sosial

Modal Sosial

Modal Sosial

Modal Sosial

Modal Sosial



Dipublikasikan oleh
**Sekolah Tinggi Pembangunan
 Masyarakat Desa "APMD",**
 sebuah perguruan tinggi yang
 sejak 1965 secara spesifik
 menggeluti pembangunan
 masyarakat desa. Lembaga ini
 mengembangkan
 tiga Jurusan:
Sosiatri D-3 dan S-1,
Komunikasi dan
Pemerintahan.

JENDELA REDAKSI

Penanggungjawab
 Sartono Sumotraruno
Pemimpin Umum
 Soebandi H. Saputro
Pemimpin Redaksi
 Sutoro Eko
Redaktur Pelaksana
 Ade Chandra
Dewan Redaksi
 Sumarjono
 M. Barori
 Hari Saptaning Tyas
 Oelin Marlilyantoro
 Hastowiyono
 Widyohari Murdianto
 Candra Rusmala
 RY Gatot
Ilustrator & Foto
 Theodorus Wuryantono
Sekretaris Redaksi
 Utami Sulistiana
 Suhardi Gitosarjono
Bendahara Redaksi
 Nuraini Dwi Astuti
 Tinggal Rohmin
Distribusi & Sirkulasi
 I Made Arjana
 Suhardi
 Tri Wahyono

JENDELA menerima
 sumbangsih gagasan,
 tulisan, informasi, foto,
 dan juga karikatur yang
 terkait dengan visi
 pemberdayaan.

Sidang pembaca yang budiman, Buletin Jendela Edisi 4 kali ini mengangkat Modal Sosial (Social Capital) sebagai fokus eksplorasinya. Belakangan ini, tak sedikit kalangan yang mengkaji wacana itu lewat berbagai situasi dan program aksi di lapangan. Sementara, para Akademisi melihat Modal Sosial lebih sebagai fenomena yang mewarnai interaksi warga berkaitan dengan berbagai bentuk kerja sama yang diselenggarakan antar elemennya secara konkrit.

Ada banyak sekali bentuk-bentuk Modal Sosial yang hingga saat ini teridentifikasi sebagai embrio bagi pemiliknya untuk mensikapi berbagai persoalan, khususnya tentang interaksi dan komunikasi seiring dinamika serta perubahan yang terjadi di lingkungan sekitar. Dunia berubah. Pola warga yang lama terdesak oleh arus perubahan yang belum jelas ke mana arahnya. Sementara banyak orang menganggap carut-marut perubahan tak tentu arah ini akibat dari inkonsistensi warga terhadap kesepakatan sosial. Ini penyimpanagn dari amanah, termasuk idealisasi modal

sosial.

Akan kah warga harus kembali ke waktu dulu, dimana modal sosial masih memberi makna hakiki dan menguntungkan warganya. Lalu mengapa 'gotong royong' yang dulu diakui keberkesamaannya membangun keswadayaan kini menghilang dari semangat kebersamaannya.

Kita mungkin sepakat bahwa setiap generasi memiliki kemampuan dan pengetahuan dalam menentukan format kehidupan yang diidealkan. Jika memang pengalaman belum bisa membuat kita lebih bijak untuk menentukan sikap, mari galang kekuatan. Karena ini juga merupakan suatu bentuk Modal Sosial yang berusaha mengintegrasikan persepsi yang terpecah. Ada hal-hal lama yang masih relevan untuk dioptimalkan kembali. Tapi bukan berarti sepenuhnya kita mundur ke belakang. Yang lebih penting untuk disadari adalah menemukan format kesepakatan-kesepakatan sosial baru, tanpa serakah melupakan Modal Sosial tempo dulu secara sebelah mata. ■

Ade Chandra

Daftar Isi:

VISI JENDELA	dalam Perspektif Sosial Budaya.....26
Haluan Baru Pembangunan Sosial....3	KIPRAH
JENDELA UTAMA	Perubahan Kuliah Kerja Nyata
Modal Sosial di Pasar Rakyat.....4	Perguruan Tinggi.....29
ARTIKEL UTAMA	KOLOM - 1
Konsep dan Relevansi Modal Sosial..8	Gotong Royong
WAWANCARA - 1	sebagai Modal Sosial.....32
"Social Capital Butuh Aturan yang	KISAH - 3
Jelas dan harus Demokratis".....9	Dasa Wisma: Modal Sosial Ibu-Ibu..35
WAWANCARA - 2	KISAH - 4
Kelompok Tani: "Wadah	Pra Koperasi "Mitra Usaha".....36
Membimbing Petani Menjadi Pribadi	KOLOM - 2
yang Mandiri".....12	Modal Sosial dan Institusi Lokal.....38
WAWANCARA - 3	KOLOM - 3
"Dignity Modal Utama	Modal Sosial dan
Social Capital.....14	Ketahanan Pangan.....40
WAWANCARA - 4	KOLOM - 4
Modal Sosial itu	Masyarakat Desa, Bersatulah!.....42
Semangat yang Menghidupi!.....18	KOLOM - 5
REMBUGAN	Revitalisasi Tradisi
Pengembangan Modal Sosial	Solidaritas Komunal.....44
Masyarakat Desa.....20	KOLOM - 6
KISAH - 1	Modal Sosial Masyarakat Jerman....46
Balai Masyarakat.....22	KISAH - 5
KISAH - 2	Forum RW: Akomodatif terhadap
"Blok": Modal Sosial Demokrasi.....24	Negara dan Masyarakat.....48
ESSAY	BUKU
Pengembangan Lokalitas	Misteri Kematian Modal.....50

Perubahan Kuliah Kerja Nyata Perguruan Tinggi

Historis KKN

KKN di cetuskan oleh Prof. Dr. Kusnadi Hardjo Sumantri, SH, sekitar tahun 1971 dengan nama "Pengabdian Pada Masyarakat". Selanjutnya ide tadi dikembangkan oleh tiga Perguruan Tinggi (PT), yaitu UGM Yogyakarta, UNHAS Ujung Pandang dan UNAND Padang. Tetapi, roh kegiatan pengabdian sudah ada

Kuliah Kerja Nyata yang sampai saat ini masih menjadi kewajiban bagi mahasiswa program strata satu dari berbagai Perguruan Tinggi. KKN merupakan modal sosial bagi pembangunan masyarakat dan lahir dari investasi mahasiswa. Idealnya KKN dijadikan grand idea bagi mahasiswa untuk menyelami permasalahan yang ada dimasyarakat dan membantu memecahkan dengan modal ilmu dan ketrampilan pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah serta dikawinkan dengan SDM dan SDA dilokasi KKN.



sejak awal kemerdekaan. Bentuk pengabdian kala itu mahasiswa dikerahkan keluar dari kampus guna ikut serta berjuang sebagai perwujudan rasa cinta tanah air dan bangsa sebagai problem ketika itu.

Tahun 1967 disusul dengan kebijakan Dikti tentang pokok pengembangan PT dalam bentuk kegiatan penelitian dan pengabdian. *Entree point* dari kebijakan itu bahwa mahasiswa diwajibkan untuk bekerja di daerah pedesaan sebagai bagian dari pendidikan. Selanjutnya pada tahun 1971 pemerintah melalui Dikti menetapkan tiga perguruan tinggi sebagai perintis pelaksanaan KKN dan ditandaskan oleh Presiden agar mahasiswa turut serta melaksanakan pembangunan di pedesaan sebagai sebuah kurikulum yang ternyata gayung bersambut terhadap program BIMMAS dan TKS BUTSI. Dari evaluasi pelaksanaan kegiatan pengabdian, maka pada 1973 pengabdian diwajibkan untuk dilaksanakan oleh semua perguruan tinggi dengan nama Kuliah Kerja Nyata.

Pasang Surut Pelaksanaan KKN

KKN merupakan kegiatan intrakurikuler yang memadukan Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagai metode yang memberikan pengalaman pada mahasiswa dalam belajar dengan mengembangkan kepekaan aspek keilmuan, teknologi, agama dan seni yang dilaksanakan diluar kampus, khususnya dipedesaan. Diharapkan mahasiswa mampu melihat antara dunia empirik dengan dunia akademik. Dengan mengimplementasikan lima prinsip *keterpaduan, interdisipliner, komprehensif, pragmatis dan partisipatif*, maka tujuan dan sasaran akan dapat dicapai, baik mahasiswa, PT, Pemerintah Daerah dan masyarakat. Pelaksanaan KKN diarahkan pada *Personality development, community development dan institutional development*. Di awal pelaksanaannya, KKN PT sampai tahun 1989, secara kualitas dan kuantitas mendekati sasaran. Respons masyarakat juga positif sebab dulu KKN dilaksanakan dalam kurun waktu minimal 3) bulan, dengan penggabungan berbagai PT dan beraneka disiplin ilmu. Di samping itu, mahasiswa yang berminat mengikuti KKN harus mengajukan

permohonan tertulis sehingga keberadaannya dilapangan benar-benar siap, baik mental dan fisik. Tapi, sejak 1989, masyarakat pedesaan sebagai sasaran KKN mulai ada kejenuhan. Di PT sendiri mulai muncul sejumlah permasalahan. Pelaksanaan KKN menjadi pro dan kontra. Dan sejak diberlakukannya UU No.2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka KKN di serahkan pada masing-masing Perguruan Tinggi.

Apa yang terjadi pada Perguruan Tinggi ketika berlakunya UU No.2 Tahun 1989 ? Ternyata keseragaman pelaksanaan KKN mulai luntur, hal ini ditandai dengan: *Pertama*,

Waktu pelaksanaan yang semula tiga bulan bergeser menjadi variatif antara dua sampai tiga bulan. *Kedua*, sasaran dan tujuan yang ingin dicapai semakin spesifik / menyempit, karena keterbatasan kemampuan mahasiswa dan Perguruan Tinggi yang bersangkutan sebab ilmu dan pengetahuan yang dikembangkan sangat terbatas pada program tertentu. *Tiga*, muncul ide-ide baru pada daerah atau lokasi dulu KKN terpusat di pedesaan sekarang bergeser pada daerah pinggiran/perbatasan antara kota dan desa, kondisi ini tercipta karena dipengaruhi oleh keterbatasan sebuah perguruan tinggi dan kejenuhan masyarakat desa sebagai obyek KKN. *Empat*, sebagian PT mengganti KKN dengan matakuliah yang sifatnya teori. *Lima*, sebagian PT mengganti KKN dengan kegiatan PKL, magang atau kegiatan sejenis. *Enam*, persyaratan akademik bagi mahasiswa yang mau mengikuti KKN bervariasi.

Aktivitas riil yang digarap mahasiswa KKN sampai pertengahan tahun 90-an tertuju bidang fisik dan non fisik dengan bobot yang tidak

seimbang. Fisik + 75% dan non fisik + 25%. Fisik cenderung pada pembuatan gorong-gorong, plangisasi, pengecatan, pembuatan pagar, pembuatan dan pengerasan jalan. Nonfisik cenderung pada penyuluhan, pendidikan dan ketrampilan tangan, serta kegiatan partisipasi bersifat pratelan, termasuk gotongroyong. Semua bentuk kegiatan KKN itu dikenal sebagai KKN konvensional atau reguler. Sebab sebelum pelaksanaan selalu diawali dengan kegiatan administratif (pemuhan persyaratan dan pendaftaran), pembekalan, observasi, penyusunan laporan obseravasi dan penyusunan program, penerjuanan, monitoring dan evaluasi. Selanjutnya implementasi program dan penarikan kemudian diakhiri dengan penyusunan laporan yang semuanya itu dilaksanakan dalam selimut serimonial dan formal.

Semua kegiatan tadi ternyata memberatkan mahasiswa. Kegiatan semacam ini memakan waktu yang panjang dan dana yang besar. Di sisi lain, kemampuan mahasiswa sangat terbatas sehingga berdampak pada keresahan mahasiswa dengan problem keterbatasan dana, miskin ketrampilan. Masyarakatpun beranggapan bahwa mahasiswa KKN adalah sinterclas (serba bisa, serba tahu, datang akan membangun, membawa banyak harta dan seterusnya). Oleh sebab itu ketika mahasiswa datang, masyarakat langsung mengajukan beberapa program dan bertanya apa yang akan ditinggalkan sebagai kenang-kenangan untuk masyarakat di sini? Sehingga bagi mahasiswa yang tidak mampu menerapkan teknik dan strategik di dalam pendekatan terhadap masyarakat akan mengalami stress/pusing. Situasi mahasiswa akan semakin parah ketika lembaga (Perti) yang bersangkutan tidak memiliki kebijakan khusus dan memberi pembekalan dengan materi yang sangat terbatas dan bersifat teoritis, sehingga salah satu jalan keluar yang dilakukan mahasiswa adalah menjual proposal untuk meminta bantuan (bahasa kasarnya mengemis) bagi pengemis yang nasibnya baik akan diberi, bila nasib sial maka kemana-mana akan ditolak. Fenomena ini berakibat mendorong mahasiswa untuk melakukan audiensi kepada pengelola KKN bahkan secara luas pada unsur pimpinan perguruan tinggi dan jika hasil audiensi tidak memuaskan mahasiswa dan dianggap

tidak dapat memberi solusi maka mahasiswa bertindak lebih parah pada sikap demonstrasi.

Mahasiswa akan semakin pusing lagi ketika ada salah satu anggota kelompoknya yang melanggar kesepakatan/norma sehingga terjadi perilaku negatif berupa perselingkuhan antara mahasiswa, mahasiswa dengan aparat, mahasiswa dengan masyarakat, dengan pendek kata terjadi peristiwa cinta lokasi.

Idealisme mahasiswa terhadap permintaan akan berupaya untuk bisa melaksanakan karena ada persepsi salah bahwa mahasiswa beranggapan jika apa yang diminta oleh masyarakat dan aparat desa bisa mengabdikan dirinya beranggapan KKNnya sukses, sedang secara riil kebiasaan ini telah terbangun pada image masyarakat

sebuah model KKN yang baru yang tidak terlalu memberatkan bagi mahasiswa.

KKN Alternatif

Imbas dari berbagai tuntutan mahasiswa mendorong sebuah perguruan tinggi untuk mengambil sikap tentang apa yang harus dilakukan dan dibenahi kedepan? Untuk memberi jawaban yang jitu maka perguruan tinggi melalui lembaga Pengabdian Pada Masyarakat (P2 M) harus menetapkan tujuan, sasaran, visi dan misi tentang pengabdian masyarakat.

Melalui Tujuan, sasaran, visi dan misi pengabdian maka kita akan mampu mengarahkan mahasiswa di dalam pelaksanaan KKN yang pada akhirnya menciptakan situasi win-win



sehingga secara tidak langsung proses pembodohan terhadap masyarakat telah tercetak secara *internalization*.

Semua fenomena di atas akan dilakukan secara terun temurun oleh mahasiswa sehingga secara tidak langsung ada kesan yang menakutkan dari mahasiswa yang telah melakukan KKN dan diwariskan kepada mahasiswa yang akan melaksanakan KKN. Maka tidaklah heran ketika kran reformasi telah dibuka pelaksanaan KKN terkena imbasnya dengan berbagai tuntutan mahasiswa tentang penghapusan KKN atau setidaknya pelaksanaan KKN konvensional/reguler segera diubah formatnya menjadi

solutions antara perguruan tinggi, mahasiswa, masyarakat dan pemerintah setempat. Sehingga pada akhirnya perguruan tinggi berani melahirkan kebijakan KKN Alternatif (KKNA). Hal-hal yang melatarbelakangi lahirnya KKNA antar lain:

- 1). Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999.
- 2). Pertimbangan empirik perguruan tinggi atas hasil kajian terhadap KKN
- 3). Kesepakatan antara Pemerintah setempat dengan perguruan Tinggi yang bersangkutan.
- 4). Tuntutan pendidikan sepanjang hayat (banyaknya mahasiswa yang



sudah bekerja sehingga tidak mampu melaksanakan KKN reguler).

Semenjak gembok reformasi telah dibuka dan berakibat banyaknya tutuntan mahasiswa maka perguruan tinggi di Indonesia pada umumnya telah melakukan revolusi pelaksanaan KKN dalam bentuk Alternatif.

Bentuk-bentuk KKNA yang telah diujicobakan di berbagai Perguruan Tinggi sangat bervariasi dalam persyaratan, waktu pelaksanaannya dan lokasi. Badan Koordinasi Kuliah Kerja Nyata (BAKOR KKN) Daerah Istimewa Yogyakarta telah mengeluarkan profil KKN Perguruan Tinggi (PTN-PTS).

Profil KKN merupakan perpaduan antara bentuk dan latarbelakang yang mendasari maksud dan tujuan diselenggarakannya KKN bagi mahasiswa sehingga terjadi kombinasi yang serasi, selaras, dan seimbang dari berbagai macam kegiatan pengabdian masyarakat. Didalam pelaksanaannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah (lokasi), pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman mahasiswa serta tergantung dari besar kecilnya peserta KKN.

Selain reguler konvensional BAKOR KKN DIY telah menetapkan bentuk-bentuk KKNA sebagai berikut :

1). Reguler I

Kuliah kerja Nyata dilakukan secara intensif selama 2 bulan dengan waktu efektif 250 jam s/d 310 jam. Mahasiswa berada di lokasi mulai tahap observasi, penyusunan program, pelaksanaan program, dan evaluasi hasil. Adapun sasrannya masyarakat secara umum maupun secara khusus.

2). Reguler II

Kuliah Kerja Nyata dilaksanakan secara intensif selama 40 s/d 45 hari termasuk waktu observasi dengan sasaran masyarakat umum maupun masyarakat khusus. Jumlah jam efektif antara 225 s/d 250 jam.

3). Reguler III

Kuliah Kerja Nyata dilakukan secara intensif selama 1 bulan, sedangkan masa observasi dan penentuan serta penyusunan program dilakukan selama 1 s/d 2 bulan pada masa observasi dilakukan secara laju.

4). Ekstensi

Kuliah kerja Nyata yang dilakukan selama 2 s/d 3 bulan dengan ketentuan mahasiswa tidak harus menginap. Adapun sarannya masyarakat umum atau masyarakat khusus, jumlah jam efektif 4 - 6 jam/hari.

5). Kemitraan I

Kuliah Kerja Nyata dilakukan selama 2 s/d 3 bulan dengan sasaran masyarakat khusus, demikian juga peserta KKN dipilih juga khusus, waktu efektif 4 - 6 jam/hari. Sebagai contoh Sibermas di Gunung Kidul dan surya Baskara bersama TNI Angkatan Laut.

6). Kemitraan II

Kuliah Kerja Nyata dilakukan selama 40 s/d 45 hari dengan sasaran masyarakat umum maupun khusus dan peserta KKN dipilih secara khusus sesuai kelompok sasaran, mahasiswa tidak harus menginap.

7). Mandiri

Kuliah Kerja Nyata dilakukan atas prakarsa sendiri selama 2 s/d 6 bulan sarannya masyarakat secara umum/khusus dan mahasiswa tidak harus

menginap.

Pelaksanaan KKN yang dilakukan dengan berbagai model semuanya akan membawa dampak positif bagi Perguruan Tinggi, masyarakat dan mahasiswa. Pertanyaan sekarang adalah lalu bagaimana dengan pelaksanaan KKN di STPMD "APMD"?

Sejak tahun 2001 melalui P2M STPMD "APMD" telah membuka kebijakan yang berkaitan dengan KKN sebagai berikut :

1.) Persyaratan mengikuti KKN mahasiswa telah menenpuh 135 SKS tanpa memperhitungkan nilai D dan E.

2). Bagi mahasiswa yang berminat pada KKN mandiri dapat mendaftarkan kapan saja tanpa dibatasi waktu

3). Bentuk KKNA ditawarkan atas kesepakatan mahasiswa di dalam memilih dan menu sesuai dengan BAKOR KNN DIY.

Dan semua model ketujuh di atas telah diujicobakan kepada mahasiswa yang berminat. Namun demikian kendala pelaksanaan KKNA tetap saja muncul antara lain :

1). Kebijakan kedalam (P2M belum diberikankewenangan secara penuh untuk melaksanakan KKNA).

2). Kendala mahasiswa (tidak semua berani dengan tawaran KKNA, sehingga kecenderungan reguler konvensional masih tinggi peminatnya).

3). Kendala masyarakat (daerah lokasi KKN terkejut dengan pola baru).

Guna membuka 3 permasalahan tersebut maka sudah pada waktunya P2M diberi Otonomi secara luas oleh pimpinan, mengubah sistem proses belajarmengajar yang berkaitan dengan pembekalan mahasiswa, sosialisasi/ memasyarakatkan model-model KKN kepada seluruh sivitas akademik dan masyarakat umum yang harus dilakukan bersama antara perguruan tinggi dan pemerintah (Bappeda, Kopertis dan lainnya).

Berdasarkan survey yang dilakukan P3M terhadap lokasi (desa) yang pernah digunakan untuk KKN mahasiswa STPMD "APMD" khususnya pada desa mitra kerja di kecamatan Prambanan kabupaten Sleman Yogyakarta memperoleh *feedback* dengan *core problem* bahwa selama ada KKN dampak positif sangat dirasakan baik aparat desa maupun masyarakat umum, Tuntutan fisik masih dominan menjadi ungkapan masyarakat.permohonan diperpanjang kembali kerjasama desa mitrakerja antara kecamatan Prambanan dengan kampus STPMD "APMD" Yogyakarta. ■

Sugiyanto